

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

A.1. Aktualitas

Penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Hutan Sidodadi Melalui Program Hutan Rakyat Dan Agroforestri Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari isu pemberdayaan masyarakat yang nampaknya telah menjadi *mainstream* dalam pendekatan pembangunan di Indonesia. Hal itu juga berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial yang sampai saat ini masih terjadi di sebagian masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai salah satu representasi negara berkembang dengan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya, pada realitanya masih memiliki sejumlah persoalan-persoalan terkait dengan kesejahteraan sosial, seperti halnya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, sebab kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor. Kemiskinan secara konseptual seperti yang dikatakan oleh Suharto (2009:18) salah duanya dapat disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural masyarakat yang bersangkutan. Kondisi struktural berkaitan dengan struktur sosial yang berkembang di masyarakat yang membuat marginalisasi pada kelompok-kelompok yang tidak memiliki sumber daya atau kekuasaan, seperti diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan / marginal dalam mengakses kesempatan sosial yang ada. Kondisi tersebut dapat diamati di lapangan pada kasus-kasus seperti tidak

meratanya distribusi berbagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat akibat campur tangan kelompok elit.

Kemiskinan struktural juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kelompok yang lemah. Misalnya pada era orde baru dengan munculnya kebijakan revolusi hijau yang justru membuat kelompok petani (buruh tani) menjadi terpinggirkan. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang masih tertinggal dan terbelakang yang sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai fasilitas pelayanan sosial. Golongan yang demikian menurut Soetomo (2013:193) terdiri dari buruh tani, petani bertanah sempit, buruh yang tidak memiliki *skill* dan pengusaha golongan ekonomi lemah yang kurang memiliki modal dan kurang memiliki fasilitas.

Kemiskinan yang terjadi saat ini juga disebabkan oleh kondisi kultural masyarakat itu sendiri. Kondisi ini menggambarkan masyarakat yang kurang memiliki partisipasi dan kapasitas yang memadai akibat budaya-budaya yang membentuk mereka menjadi individu-individu yang menyerah pada nasib. Budaya-budaya tersebut misalnya sifat malas, kurangnya kesadaran serta kemauan dari masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya, dan ketergantungan terhadap orang lain maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas rumah tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga dari pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membantu menyadarkan mereka terhadap kondisi yang tidak menguntungkan

ini, serta memampukan atau memberdayakan mereka agar mampu mengelola kehidupannya secara mandiri.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkembang secara masif seperti saat ini menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan salah satu contoh pendekatan yang dianggap ideal dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hal itu dapat dilihat dari semakin banyaknya aktor-aktor dari berbagai latar belakang yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktor-aktor tersebut di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO yang memang secara garis besar bertugas untuk membantu memberdayakan masyarakat yang kurang berdaya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini juga identik dengan program-program yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat. Di sisi lain, dari pihak pemerintah itu sendiri telah banyak mengeluarkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud konkrit pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada kelompok tani hutan merupakan salah satu contoh program pemberdayaan yang belum lama diimplementasikan oleh pemerintah. Program ini menyoal permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sebagian dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat dikatakan masih tergolong miskin. Kemiskinan yang timbul lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan modal dalam mengelola *resources* yang ada

untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi dari hal itu adalah sumber daya yang dapat dikatakan melimpah menjadi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di samping itu, tanpa adanya pengetahuan pengelolaan sumber daya hutan secara benar, masyarakat dapat memanfaatkan hutan tersebut melalui cara-cara yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Program pemberdayaan masyarakat ini kemudian hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan pada tahap awal dalam program ini adalah melalui pembentukan kelompok tani hutan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas pada kelompok tani hutan tersebut. Dengan demikian, diharapkan setelah kelompok tani hutan mampu mengorganisasi kelompok dan diri secara mandiri, maka kelompok dapat menularkan apa yang diperoleh dari program pemberdayaan masyarakat ini kepada anggota masyarakat yang lain.

A.2. Orisinalitas

Pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani hutan merupakan isu yang menarik untuk dijadikan topik penelitian sebab topik ini tidak hanya bisa dikaji oleh disiplin ilmu-ilmu sosial, tetapi juga dapat dikaji oleh disiplin ilmu yang relevan mengenai bidang kehutanan itu sendiri. Berkaitan dengan aspek orisinalitas dari penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis telah melakukan kajian dari beberapa literatur yang memiliki tema yang relevan mengenai pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini tentunya untuk

menunjukkan dan mempertegas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh I Putu Garjita yang merupakan mahasiswa Magister Ilmu Pengetahuan Univeristas Diponegoro, Indah Susilowati seorang staf pengajar Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, dan Tri Retnaningsih Soeprbowati seorang staf pengajar Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang (Garjita, I Putu. Dkk. 2014). Penelitian ini berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di KTH Ngudi Makmur Dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat partisipasi, persepsi Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur, serta memberikan alternatif strategi pemberdayaan dalam rangka pengelolaan hutan TNGM yang berkelanjutan. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* sedangkan teknik pengambilan datanya melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi. Adapun untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum anggota kelompok tersebut memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan anggota kelompok untuk aktif dalam upaya konservasi kawasan seperti penanaman pohon, pengamanan dan penyuluhan. Di sisi lain, hasil penelitian untuk tingkat persepsi kelompok terhadap manfaat keberadaan TNGM bagi masyarakat di sekitar hutan berbeda masing-masing

anggota. Sebagian besar responden (33%) berpersepsi bahwa penyebab kerusakan dari TNGM adalah letusan Gunung Merapi. Adapun untuk persepsi kelompok terhadap kondisi kawasan TNGM sebagian besar menganggap kondisi kawasan TNGM yang berada di sekitarnya masih dalam kondisi baik (kategori skor 7-8). Sementara itu, persepsi kelompok tentang pengelola kawasan dalam hal ini adalah Balai TNGM yang melaksanakan pengelolaan terhadap kawasan taman nasional sebagian besar berpendapat sudah baik (kategori skor 7-8). Untuk strategi pemberdayaan kelompok tani hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya yang terdapat tiga alternatif strategi yang dipilih berdasarkan survey, yaitu pemberian bantuan usaha kepada anggota kelompok secara merata, membangun jejaring usaha dengan melibatkan pihak terkait, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam TNGM melalui usaha budidaya.

Penelitian kedua merupakan penelitian yang berjudul Peranan Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa (Sholihin, Ali. Dkk. 2014). Penelitian ini dilakukan oleh Sholihin, Muhammad Idris, dan Anwar Parawangi, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari dinas pertanian setempat dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan proses pemberdayaan, dinas pertanian menggunakan beberapa strategi, yaitu pemberian pelatihan, penyuluhan, dan memberikan bantuan-bantuan material seperti bantuan bibit, pupuk, dan teknologi atau alat-alat pertanian. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut belum mampu berjalan maksimal. Peneliti juga tidak lupa mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan. Faktor pendukung yang dimaksud berupa anggaran dari pemerintah APBN, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, dan antusias dari para kelompok tani selama mengikuti proses pemberdayaan tersebut. Adapun untuk faktor penghambat bagi proses pemberdayaan ini meliputi kurang maksimalnya pengaplikasian materi penyuluhan dan pelatihan oleh kelompok tani yang dikarenakan masyarakat masih menggunakan sistem tradisional. Selain itu kurangnya stok bibit dan pupuk juga turut menjadi faktor penghambat dalam proses pemberdayaan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Shita Anggun Lowisada, mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dengan judul Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah (Lowisada, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan usaha tani bawang merah dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diperoleh beberapa hal bahwa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat kepada kelompok tani dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, dengan mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali sebagai langkah awal untuk mentransfer pengetahuan kepada para petani mengenai sistem tanam bawang merah dan masalah hama. Kedua, kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan swadaya dan gotong-royong dalam membangun sarana prasarana fisik seperti sistem irigasi, jembatan, dan perbaikan jalan. Ketiga, kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui permodalan. Dalam hal ini, bentuk kegiatannya berupa penyediaan bantuan permodalan kepada anggota kelompok tani dengan sejumlah nominal uang tertentu. Pihak-pihak yang turut berperan dalam memberikan permodalan dalam kegiatan ini adalah Koperasi Unit Desa setempat. Keempat, pemberdayaan dilakukan melalui penyediaan sarana produksi usaha tani bawang merah seperti penyediaan pupuk bersubsidi. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai cara, pemberdayaan yang dilakukan belum optimal dimana kelompok tani belum dapat menyediakan permodalan bagi anggotanya, permodalan dari gapoktan dan partisipasi dari para anggota masih rendah, serta pola tanam yang tidak sesuai dengan aturan sehingga hal ini belum mampu secara optimal dalam meningkatkan pendapatan usaha tani bawang merah.

Dari tiga penelitian di atas dapat ditarik beberapa butir yang menunjukkan sisi orisinalitas dari penelitian yang telah penulis lakukan. Pertama, berkaitan dengan titik tekan pada tujuan penelitian. Pada penelitian ini memiliki fokus penelitian pada proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada kelompok tani hutan dengan melibatkan aktor-aktor yang

berasal dari eksternal kelompok. Dalam konteks ini, aktor tersebut adalah pemerintah yang memiliki basis tugas dan tanggung jawab terkait dengan bidang kehutanan dan peningkatan sumber daya manusia, seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat dan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.

Apabila pada penelitian sebelumnya (penelitian yang dilakukan oleh Shita Anggun Lowisada dan Sholihin, Muhammad Idris, dan Anwar Parawangi) yang menjadi titik tekannya adalah para kelompok tani secara umum sebagai objek pemberdayaan, sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus penelitian pada kelompok tani hutan. Perbedaan kelompok sasaran dalam pemberdayaan ini bisa jadi akan berimplikasi pada perbedaan strategi yang digunakan. Sebab, hal ini juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi bagaimana program pemberdayaan ini dilakukan. Adapun untuk fokus penelitian yang dilakukan oleh I Putu Garjita, Indah Susilowati, dan Tri Retnaningsih lebih mengarah kepada tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan TNGM serta strategi pemberdayaan apa yang digunakan meskipun untuk objek penelitiannya tersebut adalah sama-sama meneliti kelompok tani hutan.

Kedua, titik tekan pada penelitian ini jika dilihat dari metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Akan tetapi, apabila dilihat pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan. Pada penelitian yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan

penelitian yang berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik deskriptif.

A.3. Relevansi dengan Kajian Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses perubahan sosial yang bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat dari yang awalnya tidak atau kurang berdaya atau sejahtera menjadi berdaya atau lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat juga identik dengan keterlibatan *multi-stakeholder*, khususnya masyarakat sebagai basis dari program itu sendiri. Sebagai sebuah pendekatan yang telah menjadi arus utama pada era saat ini, tidak heran jika pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pihak-pihak dari berbagai latar belakang untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti halnya pada kasus pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan Sidodadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi pihak pemerintah selaku penggagas program pemberdayaan pada kelompok tani hutan yang dilakukan oleh dinas-dinas yang bergerak di bidang kehutanan, seperti dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat dan pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan DI Yogyakarta.

Pemberdayaan masyarakat dalam perkembangannya juga mulai menjadi kajian atau fokus studi bagi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Hal itu dapat disebabkan dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, salah satu azas yang harus dipenuhi oleh sebuah perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi

sebuah program utama dalam implementasi azas tersebut. Di Universitas Gadjah Mada melalui Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pemberdayaan masyarakat sudah menjadi bagian dari salah satu fokus kajian utama yang mempelajari tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, fenomena pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan Sidodadi dapat menjadi kajian penting dalam memahami bagaimana proses pemberdayaan tersebut berlangsung, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi program. Kajian tentang pemberdayaan masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang atau kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program atau dalam konteks ini adalah kelompok tani hutan. Oleh karena itu, program ini diciptakan untuk mengatasi kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam mengelola sumber daya hutan dan segala isinya secara baik dan optimal yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, nantinya masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kegiatan ini untuk pengembangan kualitas hidupnya. Di samping itu, dari aspek ekologi, sumber daya hutan dapat dikelola secara baik berdasarkan kaidah-kaidah pelestarian hutan di samping mengambil manfaatnya untuk aspek kesejahteraan sosial.

B. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah hutan yang tersebar hampir di seluruh pulau. Menurut data BPS total luas hutan yang berada di daratan sejumlah 120.773.441,1 Ha. Wilayah hutan seluas itu sebagian besar tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Irian Jaya yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya. Berdasarkan fungsi utamanya, hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Adapun berdasarkan pemilikannya, hutan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu hutan negara dan hutan hak (Indriyanto, 2008:8).

Keberadaan hutan bagi masyarakat memiliki peran tersendiri dalam mendukung keberlangsungan hidupnya. Selain itu, bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan, keberadaan hutan dengan sumber daya yang ada di dalamnya telah menjadi sumber penghidupan tersendiri untuk menopang kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan makanan, papan, maupun obat-obatan yang diramu secara tradisional.

Di Indonesia, diperkirakan jumlah desa yang berada di sekitar kawasan hutan pada tahun 2010 sebanyak 31.957 desa (Hakim (Ed) dan Wibowo (Ed), 2004:76). Jumlah desa tersebut terbagi ke dalam tiga kawasan, yaitu di dalam kawasan hutan sebanyak 1.305 desa (4,08%), tepi kawasan hutan sejumlah 7.943 (24,86%), dan di sekitar kawasan hutan sebanyak 22.709 desa (71,06%) (Sumber : Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015). Adapun yang dimaksud dengan kawasan hutan dalam hal ini adalah wilayah yang berhutan maupun yang tidak berhutan dan telah ditetapkan oleh menteri

untuk dijadikan hutan tetap. Dalam hal ini, hutan tetap yang dimaksud ialah hutan, baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan (Indriyanto, 2008:6).

Masyarakat yang tinggal di wilayah hutan, baik itu di dalam maupun sekitar kawasan hutan dalam perkembangannya membentuk suatu interaksi atau pola perilaku antara masyarakat dengan lingkungan hutan. Interaksi ini berlangsung setiap waktu selama masyarakat masih memerlukan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika masyarakat mengambil manfaat dari sumber daya hutan, secara perlahan hutan akan mengalami penurunan potensi atau kebermanfaatannya. Hal itu akan terjadi secara terus-menerus sampai pada akhirnya menemui kondisi yang sudah tidak terdapat lagi potensi yang dapat diambil dari hutan tersebut. Interaksi yang semacam itulah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sangat rentan menjadi ketergantungan terhadap kekayaan alam yang berada di dalam hutan sehingga dapat dikatakan mereka memiliki ikatan yang kuat dengan alam dimana mereka tinggal.

Keberadaan hutan tidak hanya menimbulkan permasalahan terkait ketergantungan yang dialami oleh masyarakat, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, baik yang tinggal di dalam maupun di sekitarnya masih memiliki tingkat ekonomi yang tergolong rendah. Rendahnya tingkat perekonomian tersebut tidak terlepas dari rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagian dari mereka masih belum mampu mengakses informasi dan pengetahuan serta modal yang cukup. Hal itu tampak pada sumber daya alam khususnya berupa hutan dan tanah yang dimiliki di sekitar

tempat tinggalnya kurang atau belum bisa dikelola dan dimanfaatkan secara benar dan optimal. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada akhirnya mereka kurang bisa mengembangkan kualitas hidupnya karena mata pencaharian yang mereka miliki kurang mampu menopang kebutuhan hidupnya. Selain itu, kurangnya kesempatan untuk mengakses sarana dan prasarana kehidupan juga menjadi salah satu faktor kemiskinan atau rendahnya tingkat perekonomian masyarakat tersebut.

Observasi CIFOR (*Center for International Forestry Research*) menyebutkan dari sekitar 220 juta populasi penduduk di Indonesia, terdapat 48,8 juta di antaranya tinggal di kawasan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin (Wollenberg, 2004:4 dalam Winarwan, dkk. (2011)). Di samping itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis bahwa jumlah desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan sebanyak 31.957 desa. Jumlah ini merupakan 36,17% dari total seluruh desa yang ada di Indonesia (Subiyanto, 2015).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan hasil survey potensi desa pada tahun 2010 diketahui bahwa Yogyakarta memiliki masyarakat miskin di sekitar hutan dengan jumlah yang cukup besar. Jumlah tersebut terbagi ke dalam tiga kabupaten. Di Kabupaten Gunungkidul dengan 18,26% tergolong miskin, Kabupaten Bantul dengan 97,77%, dan Kabupaten Kulon Progo dengan 14,13 % (Juniarti, November 2016). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat miskin yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sebab bagaimanapun juga masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan juga

memiliki peran penting terhadap kelestarian hutan. Oleh karena itu, perlu suatu upaya dari pemerintah untuk menjadikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki kapasitas yang lebih dalam mengorganisasi kehidupannya dan mengelola sumber daya yang ada, khususnya sumber daya hutan. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Upaya-upaya yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang memiliki konsentrasi terhadap aspek sosial (kesejahteraan) dan aspek ekologi dalam satu program yang terpadu.

Pembentukan dan penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai kemandirian dan transfer pengetahuan kepada masyarakat dapat menjadi suatu upaya positif dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Kegiatan ini dapat direpresentasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Melalui program tersebut, secara tidak langsung dapat menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, sebab program ini dibentuk sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Selain itu, dari aspek ekologi, program pemberdayaan masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam program yang juga berbasis pada pengelolaan hutan agar nantinya hutan tetap terjaga kelestariannya. Contoh program pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu program pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani hutan (KTH) yang telah sedang dilakukan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

Program pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani hutan merupakan bagian dari Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Tahun 2015 – 2019 tentang Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019. Kegiatan pemberdayaan pada KTH ini dilakukan dengan memfokuskan pengembangan KTH berdasarkan kelas atau kategorinya. Dalam hal ini, kelompok tani hutan dikategorikan ke dalam tiga kelas, yaitu kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama. Pada kelas pemula, prioritas pemberdayaan lebih kepada pembinaan pada aspek kelembagaannya. Pada kelas madya dan utama lebih menekankan pada aspek kawasan dan usaha. Berkaitan dengan hal itu, salah satu KTH yang masih eksis sampai saat ini adalah KTH Sidodadi yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Program pemberdayaan masyarakat pada KTH Sidodadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi, serta geografis masyarakat tersebut. Desa Sidomulyo yang secara geografis terletak di sekitar daerah perbukitan yang sebagian wilayahnya memiliki struktur tanah yang kering dan tandus serta tanah yang tersebar di Desa Sidomulyo ini sebagian adalah tanah hutan rakyat. Adapun yang dimaksud dengan hutan rakyat dalam hal ini adalah hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat dan hutan tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Apabila mengacu pada UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka yang

dimaksud dengan hutan rakyat adalah hutan hak. Akan tetapi, oleh karena kondisi yang terjadi di lapangan adalah sifat tanah yang tandus dan kering sehingga hal itu membuat beberapa tempat tidak bisa ditanami jenis tumbuhan tertentu.

Masyarakat Desa Sidomulyo khususnya yang berada di Dusun Karangasem secara aspek sosial dan ekonomi sebagian besar masih berada pada kelas menengah ke bawah. Hal itu dapat dilihat dari pekerjaan mereka. Beberapa dari mereka tidak memiliki pendapatan yang mencukupi karena pekerjaan yang dimiliki hanya sebagai pekerja informal misalnya sebagai pekerja serabutan, buruh tani, asisten rumah tangga, dan pekerjaan informal lain yang tidak menentu. Begitupun dengan mereka yang bekerja sebagai petani. Kondisi gagal panen yang diakibatkan oleh hama dan cuaca yang tidak menentu menjadikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut semakin kompleks.

Kondisi masyarakat Desa Sidomulyo yang kurang menguntungkan, khususnya dari aspek sosial dan ekonomi pada dasarnya dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Hal itu seperti apa yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa rendahnya kapasitas masyarakat juga disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan modal untuk mengelola kehidupannya. Selain itu, kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan juga turut menjadi faktor pendukung rendahnya kapasitas masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari belum dikelola atau dimanfaatkannya beberapa potensi yang ada di tempat tinggalnya secara optimal, khususnya potensi yang berupa sumber daya

alam seperti tanah hutan rakyat yang dimiliki. Adanya kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Desa Sidomulyo tersebut dan sejalan dengan rencana strategis BP2SDM, maka dibentuklah Kelompok Tani Hutan Sidomulyo pada tahun 2015 bersamaan dengan pembentukan kelompok tani hutan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan KTH Sidodadi pada dasarnya merupakan peralihan nama dan status yang semula sebagai kelompok tani (Kelompok Tani Sidodadi) menjadi kelompok tani hutan (Kelompok Tani Hutan Sidodadi). Peralihan ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh kelompok tani yang beragam serta tanah garapan yang dimiliki terdiri dari sawah dan tanah hutan rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya KTH Sidodadi, maka program-program yang dimiliki memiliki tujuan yang lebih terfokus di bidang kehutanan.

Pada awal pembentukan program, fokus dari program ini adalah untuk membentuk aspek kelembagaannya sebagai kelompok tani hutan. Kemudian pada tahun yang sama, mulai dilakukan program penguatan kapasitas pada pengurus dan anggota KTH Sidodadi untuk membentuk dan memperkuat kelompok dari aspek kawasan dan usaha yang ada dengan fokus program seputar kehutanan dan usaha ekonomi produktif. Adapun program-program pemberdayaan yang dimaksud seperti pengelolaan hutan rakyat, agroforestri, wisata alam, dan kerajinan tamar ijuk aren. Program hutan rakyat dan agroforestri pada dasarnya adalah program-program yang sudah lama terbentuk dan dilaksanakan sebelum terbentuknya KTH Sidodadi sehingga dengan terbentuknya KTH Sidodadi ini fokus kegiatan yang berjalan adalah untuk mengembangkan atau menguatkan program-program tersebut.

KTH Sidodadi dalam perkembangannya mampu mengimplementasikan program-program pemberdayaan dengan baik, meskipun untuk hasilnya sendiri dari beberapa program belum dapat dirasakan dampaknya seperti pada program hutan rakyat dan tumpang sari (agroforestri). Hal itu disebabkan sebagian tanaman kayu-kayuan yang ditanami seperti kayu jati belum bisa dipanen. Akan tetapi, untuk program ekonomi produktif seperti kerajinan tampar dan pengolahan emping mlinjo sedikit banyak telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya yang tergabung dalam KTH Sidodadi. Hasil kerajinan tersebut telah mampu dipasarkan di daerah sekitar Kulon Progo dan Bantul. Keberhasilan KTH Sidodadi dalam mengimplementasikan program-program ini kemudian menghantarkan KTH Sidodadi menjadi wakil dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kompetisi Lomba Wana Lestari 2015 di tingkat nasional dan berhasil memperoleh juara harapan I.

Berangkat dari perihal di atas, program pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani hutan menjadi sebuah topik menarik untuk dijadikan sebuah penelitian, khususnya pada Kelompok Tani Hutan Sidodadi sebagai sebuah representasi dari *Best Practices* dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mengambil fokus penelitian terkait proses pemberdayaan masyarakat pada KTH Sidodadi. Oleh karena itu, kedepannya penulis akan berusaha menggambarkan atau menjelaskan secara detail bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat melalui pengelolaan program hutan rakyat dan agroforestri, baik dari eksternal maupun internal

masyarakat setempat. Dipilihnya program hutan rakyat dan agroforestri karena dua program ini merupakan program yang saling beririsan satu sama lain dan merupakan program utama kelompok dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ; “Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan Sidodadi melalui program hutan rakyat dan agroforestri di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo?”.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat pada Kelompok Tani Hutan Sidodadi melalui program hutan rakyat dan agroforestri di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
- b. Dapat menjadi bahan masukan (*input*) kebijakan bagi instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kepada Kelompok Tani Hutan Sidodadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

F. Tinjauan Pustaka

F.1. Landasan Teori

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial Max Weber yang sebagai tokoh utama dalam paradigma tersebut. Max Weber mengemukakan beberapa hal tentang tindakan sosial atau tindakan yang penuh arti sebagai pokok persoalan atau inti tesis dalam paradigma ini. Dalam hal ini, Weber melihat bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial dimana individu menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu, ia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* (*understanding*).

Dalam istilah lain, *verstehen* juga diartikan sebagai pemahaman subjektif (*subjective understandable*), pemaknaan dalam perspektif subjektif (*interpretation in subjective terms*), atau pemahaman (*comprehension*). Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya (Tom Campbell (1994) dalam Zahinuddin Maliki, 2012:262).

Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan ke orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukan termasuk tindakan sosial (Ritzer, 1980, terjemahan Alimandan, 2013)

Tindakan sosial menurut Weber dapat berupa tindakan yang secara nyata diarahkan kepada orang lain. Tindakan sosial juga dapat berupa

tindakan yang bersifat membatin atau subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Tindakan sosial juga berupa persetujuan yang secara passif dalam situasi tertentu. Di samping itu, tindakan sosial dalam hal ini masih memiliki ciri-ciri tertentu. Tindakan sosial dapat pula dibedakan berdasarkan sudut waktu, yaitu tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, masa lalu, atau masa yang akan datang. Dilihat dari segi sasarannya, maka pihak yang menjadi sasaran tindakan sosial dapat berupa individu atau kelompok.

Weber yang dikutip dari Maliki (2012:264) juga melihat setidaknya tidaknya tindakan individu bisa diarahkan kepada empat kemungkinan;

- Pertama, diarahkan kepada orientasi rasional terhadap tujuan individu yang berbeda dengan tujuan individu lain. Orientasi inilah yang disebut dengan rasionalitas instrumental, yang melalui harapan terhadap objek di luar atau orang lain sebagai “kondisi” atau “alat” meraih keberhasilan mencapai tujuan rasional yang telah ditetapkannya
- Kedua, diarahkan terhadap orientasi rasional terhadap nilai absolut, yang melibatkan kesadaran akan keyakinan nilai absolut dari suatu etika, estetika, agama, atau bentuk-bentuk lain dari perilaku kesemua itu terlepas dari keberhasilan eksternal
- Ketiga, diarahkan kepada sesuatu yang berpengaruh, khususnya terhadap emosi yang ditentukan oleh faktor tertentu serta kondisi perasaan aktor itu sendiri

- Keempat, secara tradisional diarahkan melalui kebiasaan yang sudah berjalan dalam jangka waktu yang lama.

Dengan demikian, tindakan rasional individu sebenarnya didasarkan pada dua jenis rasionalitas, yaitu rasionalitas instrumental (*zweckrationalitat*) dan rasionalitas yang berorientasi pada nilai (*wertationalitat*). Di luar itu, tindakan individu diarahkan kepada tindakan tradisional yang non-rasional berdasarkan kebiasaan atau tindakan efektif yang didominasi perasaan atau emosi.

Rasionalitas instrumental akan melibatkan pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai pemilik berbagai macam tujuan yang mungkin diinginkannya. Dengan berdasarkan kepada kriteria tertentu, individu melangkah dengan menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang bisa jadi justru saling bersaing.

Individu menilai alat yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih. Hal itu mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam lingkungan. Selebihnya individu mencoba meramalkan konsekuensi yang mungkin timbul dari beberapa alternatif tindakan itu.

Berbeda dengan rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai lebih menekankan bahwa tindakan dikendalikan oleh kesadaran akan keyakinan dan komitmen terhadap tatanan nilai yang luhur seperti kebenaran, keindahan, dan atau keadilan, serta keyakinan kepada Tuhan.

Paradigma definisi sosial memiliki teori-teori dengan perspektif masing-masing teori tidak terlepas dari kerangka berpikir Weber. Teori-teori tersebut yaitu teori aksi, interaksionalisme simbolik, dan teori fenomenologi. Sebagai landasan dalam membantu menganalisis hasil penelitian, maka penulis kemudian menggunakan teori aksi yang perspektif-perspektif di dalamnya dikemukakan oleh beberapa tokoh.

F.1.1. Teori Aksi

Teori ini sepenuhnya mengikuti cara berpikir Weber. Dalam perkembangannya banyak tokoh Barat yang terlibat dalam memberikan asumsi dan perspektif dalam teori ini, di antaranya Talcott Parsons (1937), Mac Iver (1931), Florian Znaniecki (1934), dan Hinkle (1963).

Beberapa asumsi fundamental Teori Aksi yang dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki, dan Parsons dalam (Ritzer, 1980, terjemahan Alimandan, 2013:46) sebagai berikut :

- a. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek
- b. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan
- c. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut
- d. Keberlangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya

- e. Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang, dan yang telah dilakukannya.
- f. Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul saat pengambilan keputusan
- g. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif seperti metode *verstehen*, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Tujuh premis Hinkle dalam teori aksi pada dasarnya sudah dikemukakan oleh Sosiolog Yunani Kuno seperti Santo Thomas Aquino di abad 18. Hinkle juga menunjukkan bahwa pendekatan seperti Teori Aksi ini telah diketahui jauh sebelum perang dunia I oleh Sosiolog seperti Lester Ward, E.A. Ross, F. Giddings, A.Small dan C.H. Cooley. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran mereka tidak begitu erat hubungannya dengan Teori Aksi Modern yang mereka menilai bahwa individu kurang memiliki keaktifan dan pemikiran kreatif sebagaimana dinilai oleh penganut Teori Aksi Modern.

Cooley dalam hal ini sedikit memiliki pandangan yang berbeda terhadap pemikiran di atas. Cooley berpendapat bahwa sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah apa yang disebutnya sebagai kesadaran subjektif yang secara tidak langsung Cooley memiliki pemikiran yang sama bahwa individu memiliki sifat yang aktif dan kreatif. Selain itu, menurut Cooley perasaan-perasaan individual, sentimen, dan ide-ide juga menjadi faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain.

Tokoh lain yang juga turut menyumbangkan asumsinya terhadap Teori Aksi adalah Talcott Parsons. Parsons juga merupakan pengikut Weber yang berusaha memisahkan Teori Aksi dengan aliran Behaviorisme. Dipilihnya kata *action* bukan *behavior* karena menurutnya memiliki konotasi yang berbeda. *Behavior* secara tidak langsung menyatakan kesesuaian secara mekanik antara perilaku (respons) dengan rangsangan dari luar (stimulus), sedangkan istilah *action* menyatakan secara tidak langsung aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan individu. Menurutya, Teori Behavior menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek subjektif tindakan manusia (Ritzer terjemahan Alimandan (2013:48)).

Parsons dalam Ritzer terjemahan Alimandan (2013:46) kemudian menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan dalam karakteristik sebagai berikut :

- a. Adanya individu selaku aktor
- b. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu
- c. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuannya
- d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuannya. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi
- e. Aktor berada di bawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan

menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Contohnya kendala kebudayaan.

Aktor mengejar untuk mencapai tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat yang digunakan. Norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, melainkan ditentukan oleh kemampuan aktor itu sendiri. Kemampuan itulah yang disebut Parsons sebagai *voluntarism*. Singkatnya, *voluntarism* adalah kemampuan individu sebagai aktor melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Konsep *voluntarism* inilah yang kemudian menempatkan Teori Aksi ke dalam paradigma definisi sosial.

F.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini merupakan konsep penting untuk membantu menjabarkan secara operasional bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pada KTH Sidodadi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dilakukan. Penulis akan menjelaskan beberapa definisi terkait konsep pemberdayaan (dalam konteks masyarakat) itu sendiri menurut beberapa tokoh.

Mardikanto dan Soebiato (2015) yang mengutip pendapat dari Robbins, Chattarjee, & Canda (1998) secara singkat menyatakan sebagai berikut :

“Empowerment is process by which individuals and groups gain power, access to resources, and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals.”.

“Pemberdayaan adalah proses yang mana individu-individu dan kelompok memperoleh kekuatan/kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan kontrol terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka mampu memperoleh kemampuan untuk meraih tujuan dan aspirasi kelompok dan pribadi mereka”.

Selain itu, definisi pemberdayaan juga disampaikan oleh Dharmawan (2010) (dikutip dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015) yang menjelaskan sebagai berikut :

“A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, to more easily access to a source of better living”.

“Sebuah proses kepemilikan energi yang cukup yang memungkinkan orang-orang meningkatkan kapabilitasnya untuk memiliki posisi tawar yang lebih besar, membuat keputusan mereka sendiri, memperoleh akses yang lebih mudah terhadap sumber kehidupan mereka yang lebih baik”.

Istilah pemberdayaan juga dijelaskan oleh Subejo dan Narimo (2004) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (dikutip dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:30). Konsep pemberdayaan masyarakat dalam perkembangannya juga mengalami perkembangan makna dan perspektif. Perkembangan tersebut menjadikan konsep pemberdayaan masyarakat ini menjadi sebuah pendekatan utama di dalam pembangunan masyarakat. Seperti yang dikutip dari Soetomo (2011:69) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama

masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan program sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menarik manfaat hasil pembangunan. Di samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya.

Definisi pemberdayaan yang diberikan oleh Subejo dan Narmo serta dari Soetomo di atas yang kemudian menurut penulis paling relevan dan mampu membantu penulis untuk menguraikan, memahami, dan menganalisis bagaimana proses pemberdayaan yang berlangsung pada KTH Sidodadi melalui program hutan rakyat dan agroforestri. Sebab, konsep pemberdayaan dari Subejo dan Narmo serta Soetomo menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses memampukan dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola kehidupan mereka mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan program, sampai pada pasca pelaksanaan program. Serta menurut Subejo dan Narimo bahwa proses pemberdayaan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga aspek ekologi. Hal itu tentunya relevan dengan kondisi masyarakat dan tujuan dari diciptakannya program pemberdayaan pada kelompok tani hutan, bahwa program ini tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi juga meningkatkan kelestarian lingkungan secara umum, dan kelestarian hutan secara khususnya.

Mardikanto dan Soebiato (2015) menyebutkan bahwa pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*)

dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Pengertian *community development* yang diartikan pembangunan masyarakat menurut Ndraha (1987:72) dalam Soetomo (2010) pada dasarnya memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pembangunan masyarakat diartikan sebagai perubahan sosial berencana baik di bidang ekonomi, teknologi, sosial, maupun politik. Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek manusia dan masyarakat, sedangkan dalam arti sempit, pembangunan masyarakat diartikan sebagai perubahan sosial terencana pada lokalitas tertentu.

Dari beberapa definisi mengenai pemberdayaan masyarakat di atas, hal penting yang dapat diambil kesimpulan adalah bahwa pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah langkah positif dalam rangka memampukan dan memandirikan masyarakat. Apabila dalam sebuah masyarakat mengalami permasalahan sosial seperti kemiskinan, maka sudah sewajibnya membantu mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan tersebut. Hal itu sama halnya dengan membantu meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang terperangkap dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan (Sunartiningsih (Ed), 2004:21). Dalam rangka pemikiran tersebut, maka upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*). Dalam hal ini, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki

potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung nilai arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi, karena hal itu justru mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah (Mardikanto dan Soebiato, 2015:32).

Pemberdayaan masyarakat dalam implementasinya juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Seiring dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip tersebut kemudian mengalami

perkembangan pula. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat mengalami pergeseran beberapa kali, misalnya pergeseran yang belum lama berlangsung, yakni terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia yang berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Adapun yang termasuk ke dalam prinsip pemberdayaan menurut Soedijanto (2001) yaitu :

- 1) Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya paksaan, melainkan harus dilandasi kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;
- 2) Otonomi, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain;
- 3) Keswadayaan, adalah kemampuan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan dari pihak luar;
- 4) Partisipatif, artinya keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan manfaat akan hasil-hasilnya;
- 5) Egaliter, yaitu menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang sejajar, setara, tidak ada yang ditinggikan, dan tidak ada yang direndahkan;
- 6) Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara *stakeholders*;

- 7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan;
- 8) Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
- 9) Akuntabilitas, adalah yang dapat mempertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
- 10) Desentralisasi, adalah memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan (dikutip dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:81).

Secara umum, prinsip dan tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan atau memperkuat kapasitas (kemampuan dan daya) masyarakat sebagai kelompok sasaran. Penguatan kapasitas tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardikanto dan Soebiato (2015) adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok / organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di area global untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Dalam pengertian ini terkandung pemahaman bahwa :

- 1) yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan (individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain) untuk

- menunjukkan / memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 2) kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan;
 - 3) pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas;
 - 4) yang dimaksud dengan kelembagaan tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, perkumpulan atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas, menyangkut perilaku, nilai, dan sebagainya.

Definisi lain dari pengembangan kapasitas juga disampaikan oleh Soetomo (2009:252), ia mengatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai pengembangan wawasan dan tingkat pengetahuan, peningkatan kemampuan untuk merespon dinamika lingkungannya, peningkatan *skill*, peningkatan akses terhadap informasi, peningkatan akses dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai perubahan yang terencana, yang direncanakan dalam pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana memberikan rangsangan dan dorongan agar masyarakat terbangun dan berkembang kapasitasnya.

Soetomo (2009:255) lebih jauh lagi juga menjelaskan tiga unsur pokok dalam pengembangan kapasitas, yaitu pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan institusional, dan pengembangan organisasional. Pengembangan sumberdaya manusia menjadi penting karena unsur utama masyarakat adalah individu. Apabila pengembangan kapasitas sudah mampu diwujudkan, hal itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar

bagi pengembangan kapasitas masyarakatnya. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat tidak hanya mengandung tindakan individu, melainkan juga terdapat tindakan bersama.

Untuk mewujudkan kepentingan bersama, maka tindakan bersama diwadahi dalam organisasi sosial tertentu. Agar harapan dan kepentingan bersama tersebut dapat terwujud secara efektif, maka organisasi sosial harus memiliki ruh yang mampu menggerakkan tindakan bersama tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, hal itu dapat terwujud sebagai pola tindakan bersama yang sudah melembaga (*institution*).

Tindakan bersama yang menjadi unsur penting dalam pengembangan kapasitas tersebut tidak bisa berjalan jika tanpa diikuti oleh partisipasi dari seluruh anggota masyarakat. Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti (2009:31-323) yang dikutip dari Fanny, dkk. (2016) mendefinisikan partisipasi sebagai pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Beal dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari partisipasi adalah semakin mantapnya jaringan

sosial baru yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.

Berkaitan dengan jenis partisipasi, Cohen dan Uphoff dalam Siti Astuti D. (2009:39-40) yang dikutip dalam Rosyida dan Nasdian (2011) mengemukakan empat jenis partisipasi, yaitu :

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Yadav (UNAPDI, 1980) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) yang membagi partisipasi ke

dalam empat jenis juga, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pengambilan manfaat hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaan partisipasi, terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat. Sifat faktor-faktor tersebut dapat pula mendukung keberhasilan program, tetapi ada pula yang menjadi penghambat keberhasilan program. Menurut Angell (1967) seperti yang dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) dalam Setya (2012) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.